



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2005

**NEGARA MADURA: SEJARAH PEMBENTUKAN HINGGA
PENYELESAIANNYA DALAM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**



Oleh:

**Drs. Muryadi
Drs. Sukaryanto, M.Si.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor : 036/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005
Nomor Urut : 65

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2005

HISTORIC DISTRICTS - MADURESE



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2005

**NEGARA MADURA: SEJARAH PEMBENTUKAN HINGGA
PENYELESAIANNYA DALAM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

Oleh:

Drs. Muryadi
Drs. Sukaryanto, M.Si.

KKB
KK-2
LP 106/08

Mur
n

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor : 036/SPPP/PP-PM/DP3M/IV/2005
Nomor Urut : 65

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2005





**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-Mail : infolemit@unair.ac.id - http://lppm.unair.ac.id

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. a. Judul Penelitian | : Negara Madura: Sejarah Pembentukan Hingga Penyelesaiannya dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. |
| b. Macam Penelitian | : () Fundamental () Terapan (v) Pengembangan |
| c. Kategori Penelitian | : I / II / III |
| 2. Kepala Proyek Penelitian | |
| a. Nama Lengkap | : Drs. Muryadi |
| b. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| c. Pangkat /Golongan/ NIP | : Penata/ IIIC/ 132090176 |
| d. Jabatan Sekarang | : Lektor |
| e. Fakultas/ Jurusan / Puslit | : Sastra/ Ilmu Sejarah |
| f. Universitas/Ins./Akademi | : Universitas Airlangga |
| g. Bidang Ilmu yang Diteliti | : Sejarah |
| 3. Jumlah Tim Peneliti | : 1 orang |
| 4. Lokasi Penelitian | : Surabaya |
| 5. Kerjasama dengan Instansi lain | |
| a. Nama instansi | : - |
| b. Alamat | : - |
| 6. Jangka Waktu Penelitian | : 6 bulan |
| 7. Biaya yang Diperlukan | : Rp 6.000.000,00
(Enam Juta Rupiah) |

Surabaya, 10 Desember 2005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Airlangga

Drs. Heru Supriyadi
NIP. 131696499

Ketua Peneliti

Drs. Muryadi
NIP. 132090176

Mengetahui:

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Airlangga

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP. 130701125



RINGKASAN

**NEGARA MADURA: SEJARAH PEMBENTUKAN HINGGA
PENYELESAIANNYA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**
(Muryadi, Sukaryanto, 2005, 49 halaman)

Penelitian historis ini membahas mengenai sejarah pembentukan Negara Madura hingga penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa masalah yang dikaji, yakni: (1) Bagaimakah proses dari pembentukan Negara Madura serta keterlibatan Belanda dalam pembentukan Negara tersebut; (2) Bagaimanakah sikap dan reaksi masyarakat Madura terhadap pembentukan Negara tersebut; (3) Bagaimana proses pembubaran dari Negara Madura tersebut untuk selanjutnya kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk: (1) memahami proses pembentukan Negara Madura; (2) memahami keterlibatan Belanda dalam pembentukan Negara Madura; (3) memahami sikap dan reaksi masyarakat Madura terhadap pembentukan Negara tersebut; (4) memahami proses pembubaran dari Negara Madura untuk selanjutnya bergabung dalam NKRI.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis, yang memiliki lima tahapan, yakni: (1) pemilihan topik; (2) pengumpulan sumber; (3) verifikasi; (4) interpretasi, dan (5) penulisan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini kebanyakan berupa dokumen arsip yang sudah dibukukan oleh Badan Arsip Propinsi Jawa Timur pada seri penerbitan naskah sumber arsip no. 2. Selain itu juga digunakan literature-literatur pendukung.

Dari hasil penelitian maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: Belanda memiliki peranan yang sangat besar dalam usaha untuk mendirikan Negara Madura terutama melalui peranan Letnan Gubernur Jenderal van Mook. Sebenarnya keinginan untuk membentuk Negara Madura sebenarnya dari Belanda sendiri agar Negara Indonesia Serikat yang dibentuknya menjadi kuat Sementara pengalaman sejarah yang tidak mengenakan yakni pada masa kerajaan, wilayah ini selalu berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan besar di Jawa menyebabkan para pemimpin lokal di Madura lebih memilih untuk mendirikan Negara sendiri dari pada menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pusat ibukotanya di Jawa. Dari pengalaman pemimpin lokal Madura terdahulu ternyata hubungan mereka dengan Belanda sudah sering dilakukan misalnya dalam bentuk keikutsertaan mereka dalam Barisan Madura. Di mata para pemimpin lokal Madura seperti Cakraningrat kerjasama dengan Belanda lebih menguntungkan dari pada kerjasama dengan para penguasa Jawa. Dalam pemungutan suara yang banyak mendapat tekanan dari Belanda ini akhirnya dimenangkan oleh pihak yang pro terhadap pembentukan Negara Madura. Pada tanggal 20 Februari 1948 secara resmi telah berdiri Negara Madura yang terpisah dari RI. Pengakuan mengenai status Negara Madura ini dilakukan oleh Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sementara itu untuk Dewan Perwakilan Negara Madura telah diadakan pemilihan yang berakhir pada tanggal 15 April 1948. Dalam bulan Juli 1948 Dewan Perwakilan Rakyat Madura

Sementara dilantik di Pamekasan. Dewan ini sebenarnya memiliki tugas yang sangat berat, karena disatu pihak harus bekerja sama dengan Wali Negara dan pemerintah Reomba, sedang dilain pihak harus berusaha memenuhi aspirasi rakyat yang menghendaki supaya kembali kepangkuan NKRI. Setelah melalui berbagai resolusi dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat yang pro Republik akhirnya Wali Negara dan DPR Madura bersedia untuk meletakkan jabatannya. Akhirnya dengan Surat Keputusan Presiden RIS tanggal 19 Maret 1950 daerah Madura ditetapkan sebagai residensi dari RI. Mulai saat ini maka bubarlah Negara Madura yang berusia kurang dari satu tahun itu.

(Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga, Kontrak Nomor. 65/DP3M-DM/2005).

Kata kunci = Separasi ; negara madura ; negara kesatuan RI

SUMMARY

MADURESE STATE: A HISTORY OF STATE FORMATION AND ITS INTEGRATION INTO UNITARY STATE OF REPUBLIC OF INDONESIA

This historical research deliberately investigated a history of Madurese state formation and its integration into the Unitary State of Republic of Indonesia. The research attempted to study: (1) how some processes around the Madurese state formation actually took place and to which extent the Dutch involved in such state formation; (2) how the Madurese people took a reaction and attitude against the state formation; and (3) how processes in associated with the dissolution of Madurese state occurred and then it integrated into the Unitary State of Republic of Indonesia (henceforth called NKRI).

The recent research was aimed at (1) understanding several processes in the course of Madurese state formation; (2) elucidating the Dutch's involvement within the state formation; (3) considering the Madurese people's reaction and attitude toward the state formation; and (4) explaining dissolution process of the Madurese state and its integration into the NKRI.

The research employed a historical method consisting of five stages namely: (1) a topic selection; (2) collection of data sources; (3) verification; (4) interpretation and (5) writing. Some sources used in the research were including a set of documents kept by East Java Archive Agency in manuscript publication of archive source No. 2. Furthermore, several support bibliographies were also used.

From the research results the following conclusions were drawn. The Dutch played a very substantial role in the efforts of establishing the Madurese state, mainly through Lieutenant Governor General van Mook. Essentially, the desires to establish the Madurese state derived from the Dutch themselves with an expectation that Federal Republic of Indonesia that they has formed would be strong enough. Meanwhile, the unpleasant historical experiences indicated that the Madurese area was always under the control of the big monarchies in Java, which ultimately caused some local leaders to establish the state by themselves rather than being the part of Unitary State of Republic of Indonesia with a capital in Java. From the previous experiences of the local Madurese leaders, it was clear evident that they have built a close relationship with the Dutch, particularly in line with their participation in the Madurese Front. In the eyes of local Madurese leaders such as Cakraningrat, the cooperation with the Dutch brought greater benefits compared with a similar cooperation with Java elites. Finally, in the voting under strong pressures from the Dutch government, those who were in favor of the Madurese state formation won over their rivals. The Madurese state was formally found on 20 February 1948, being independent of Republic of Indonesia. Encouragingly, Lieutenant Governor General of Netherlands recognized the Madurese state formally. The members of the Madurese Legislature were elected on 15 April 1948. In July 1948 the Provisional Legislature members of Madurese state were inaugurated in Pamekasan. These legislative members must do very heavy tasks since on the

one hand they should collaborate with Prime Minister and Recomba government, and on the other hand they should fully took into account the aspirations of some people who wanted to integrate into the NKRI. After through many resolutions and demonstration undertaken by people in favor of Republic of Indonesia, Prime Minister and Madurese legislature resigned from their office. By Federal Republic of Indonesia President's decree dated 19 March 1950, the Madurese area was stipulated as regency or the part of Republic of Indonesia. Since then, the Madurese state dissociated and dissolved with less than one year age.

(Department of History, Faculty of Letters Airlangga University, the Contract Number: 65/DP3M-DM/2005).

KATA PENGANTAR

Penelitian yang berjudul: Negara Madura: Sejarah Pembentukan hingga Penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan peneliti mengenai masih minimnya penelitian yang membahas mengenai berdirinya Negara-negara bagian atau negara negara federal yang pernah mewarnai sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam buku-buku sejarah Indonesia topik mengenai negara-negara bagian atau negara federal hanya disinggung sepintas lalu saja sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang utuh. Hingga saat ini baru beberapa buku yang membahas mengenai beberapa negara bagian misalnya yang membahas Negara Indonesia Timur. Sementara untuk negara-negara bagian lainnya rupanya hingga saat ini belum ada yang menulis. Berangkat dari sinilah peneliti berusaha untuk membahas salah satu negara bagian yang pernah ada dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni Negara Madura.

Tulisan ini ide awalnya ketika peneliti membaca salah satu buku kumpulan arsip yang diterbitkan oleh Badan Arsip Propinsi Jawa Timur tahun 2002. Buku ini khusus memuat atau tepatnya menyalin dari arsip aslinya mengenai seputar pembentukan Negara Madura. Dokumen-dokumen arsip yang ada dalam buku inilah yang oleh penulis dicoba diolah menjadi hasil penelitian sejarah ini.

Penelitian ini dapat terlaksana karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Bagian DP3M Dirjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan kepercayaan sekaligus kesediaan mendanai penelitian ini;
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga yang

telah membantu proses pelaksanaan penelitian;

3. Pembantu Dekan I Fakultas Sastra Universitas Airlangga yang telah memberi rekomendasi untuk mengajukan proposal penelitian ini;
4. Anggota peneliti yang telah menyediakan waktu, tenaga , dan pikirannya dalam membantu terlaksananya penelitian ini; serta
5. Istriku Titin Romziah, serta kedua anakku Hayiz Historia Adhi Pratama dan Sabrina Historifa Dewi Fortuna yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan penelitian ini.

Penelitian in masih sangat jauh dari sempurna, untuk itu berbagai kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan serta diucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, Desember 2005

Ketua Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
SUMMARY.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	10
BAB IV METODE PENELITIAN.....	12
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
5.1 Kebijakan van Mook Membentuk Negara-Negara Bagian.....	15
5.2 Beban Sejarah Keinginan Membentuk Negara Madura.....	22
5.3 Pembentukan Negara Madura.....	27
5.4 Sikap dan Reaksi Masyarakat terhadap Pembentukan Negara Madura.....	31
5.5 Pembubaran Negara Madura untuk Kembali ke dalam NKRI.....	39
BAB VI KESIMPULAN	44
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selama kurang lebih dari empat puluh tahun kita ditabukan membicarakan tentang konsep negara lain, selain dari negara kesatuan, padahal masih banyak alternatif lain selain itu, misalnya negara federal. Tidak ada yang sacral dalam politik sehingga tidak boleh dibicarakan, dikritik, diubah, dan diganti. Sistem politik adalah produk manusia, oleh karena itu ia dapat diubah dan diganti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian juga halnya dengan konsep negara.

Era keterbukaan yang dimulai dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada bulan Mei 1998 ditandai antara lain oleh kebebasan mengutarakan pendapat. Akibatnya muncul berbagai pandangan yang selama Orde Baru atau bahkan pada masa sebelumnya tidak boleh dibicarakan. Salah satu diantaranya adalah masalah bentuk negara. Negara kesatuan yang dianut Indonesia perlu ditinjau kembali dengan mengkaji kembali kemungkinan-kemungkinan negara serikat (negara federal atau negara federasi). Negara kesatuan merupakan salah satu penyebab terjadinya manipulasi kekuasaan oleh penguasa sehingga merugikan daerah-daerah di Indonesia. Sebaliknya negara federal bisa merupakan salah satu alternatif untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di tangan pemerintah pusat dan berkembangnya potensi daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing (Rauf, 1999:1).

Persoalan bentuk negara federasi, pada awal memasuki reformasi, kembali mencuat dan ditawarkan untuk dijadikan alternatif dari bentuk negara kesatuan, yang ternyata tidak dapat mewujudkan cita-cita untuk hidup dan sejahtera bersama. Adanya ide untuk mencari alternatif bentuk negara itu, seharusnya tidak ditentang

dengan alasan separatis, disintegrasi, serta anti Pancasila, malah sebaliknya karena kembali kepada bentuk negara federasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehendak separatis. Bahkan sebaliknya, justru adalah usaha beralternatif untuk tetap mempertahankan kehidupan bersama sebagai bangsa dan Negara (Gonggong, 1999:5 dan 15).

Berkaitan dengan itu, maka bermunculan tokoh-tokoh Indonesia yang melontarkan ide tentang Negara federal. Di antaranya adalah Amin Rais, Mangunwijaya, dan Mar'ie Muhammad. Gagasan Negara federal yang disodorkan Amin Rais berangkat dari terbungkamnya daerah oleh otoritas pusat. Daerah terbungkam, pembagian kue pembangunan tidak merata, dan kebijakan-kebijakan daerah selalu dikomando oleh pusat. Oleh karena itu ketika kue pembangunan dibagi tidak merata, yang terjadi kemudian adalah runtuhnya mitos keadilan social-ekonomi untuk semua rakyat.

Menurut Amin Rais, selama ini kita sudah menerapkan Negara kesatuan. Pada zaman Soekarno memunculkan PRRI/Permesta. Dasar pemberontakan di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara adalah ketidakpuasan daerah. Mereka melihat bahwa hasil-hasil kekayaan nasional tidak dibagi secara adil antara pusat dan daerah. Pada zaman Soeharto, negara kesatuan memunculkan konsep "Negara Aceh Merdeka", "Negara Papua Merdeka". Dibanyak propinsi kuat sekali ketidakpuasan itu, pangkalnya tentu pembagian rezeki yang lagi-lagi tidak adil antara pusat dan daerah. Selama 32 tahun pemerintah Orde Baru, bentuk negara kesatuan sudah tidak produktif. Hingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang parah, antara Jawa dan luar Jawa dan

menanamkan kereshan di berbagai daerah yang kekayaannya dianggap habis ke pusat dan dikembalikan ke daerah lewat APBN dalam jumlah kecil.

Demikian juga halnya dengan Ma'rie Muhammad. Menurutnya, "memikirkan bentuk negara federal jangan diartikan akan memecah belah persatuan bangsa, tetapi justru dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan yang riil, tidak semu, dan tidak artificial". Ma'rie menilai berbagai kerusuhan yang dipicu sentiment etnis dan agama yang kental yang muncul di berbagai daerah, menunjukkan betapa slogan kesatuan dan persatuan yang didengungkan dalam bingkai negara kesatuan sangat artifisial sifatnya. Dengan bentuk negara federal, suatu suku bisa lebih menerima kehadiran suku lain di daerahnya, karena merasa sudah betul-betul memiliki derajat yang sama dan tidak merasa dipaksakan.

Dalam bukunya Menuju Republik Indonesia Serikat, Mangunwijaya menjelaskan bahwa sesungguhnya cita-cita Republik Indonesia Serikat berbentuk federal sudah lama berakar dalam perjuangan Bapak Bangsa kita, Mohammad Hatta. Mangunwijaya menjelaskan bahwa federalisme bukanlah federalisme Belanda tahun 50-an, akan tetapi yang ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri secara jujur dan adil lewat konstituante yang juga ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri (Djafaar, 2005:3-4).

Penelitian historis ini berusaha menempatkan sesuai dengan zamannya mengenai pengalaman sejarah Indonesia ketika masih dikuasai penjajah Belanda yang menetralkan bentuk negara Indonesia federal, salah satunya adalah Negara Madura.

Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia adalah bahwa Belanda

mengakui Negara Indonesia berbentuk Serikat. Hasil persetujuan dan kesepakatan dalam KMB yang berakhir pada tanggal 2 Nopember 1949 adalah dibentuknya satu Negara federal di Indonesia (Pusponegoro, 1992:205). Negara federal baru itu diberi nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS sendiri terdiri dari negara-negara bagian, diantaranya adalah: Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Madura, dan sembilan satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Masing-masing negara bagian mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda.

Meskipun pembentukan Negara-negara bagian ini merupakan peristiwa pahit yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, namun hingga saat ini masih sangat sedikit penelitian sejarah yang membahas mengenai eksistensi Negara-negara bagian tersebut. Penelitian ini berusaha membahas mengenai proses pembentukan Negara Madura hingga penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan RI.

Negara Madura didirikan pada tanggal 20 Februari 1948 dengan Cakraningrat sebagai Kepala Negara (Nyoman Dekker, 1980:55). Dalam sejarah Indonesia disebutkan bahwa pada bulan Desember 1947 di Jakarta terbentuklah Komite Indonesia Serikat yang terdiri dari wakil-wakil negara bagian, tokoh-tokoh politik untuk membentuk Negara Indonesia Serikat. Pada tanggal 14 Januari 1948, Residen Madura mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk membicarakan dan membentuk Komite Penentuan kedudukan Madura. Komite ini terdiri 11 orang dan R.A.A. Tjakraningrat sebagai penasihatnya.

Komite 11 orang tersebut lalu menentukan saat dilaksanakan pemungutan suara. Rakyat yang berhak memberi suara hanya menentukan setuju dan blanco. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 14, 16, dan 23 Januari 1948 dengan tekanan-tekanan dari pihak Belanda. Pada tanggal 29 Januari 1948 Komite melaporkan hasil pemungutan suara dan pada tanggal 20 Februari 1948 pengakuan status Negara Madura ditetapkan oleh Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Untuk Dewan Perwakilan Negara Madura telah diadakan pemilihan yang berakhir tanggal 15 April 1948. Pada saat pemilihan itu dibentuklah secara illegal suatu kegiatan agar supaya orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang pro-Republik. Akan tetapi Belanda adanya gerakan itu, maka pada tanggal 24 Agustus 1948 diadakan penangkapan-penangkapan secara besar-besaran kepada mereka yang masih bersimpati terhadap NKRI, dan mereka ini ditahan di rumah-rumah penjara di Surabaya (Abdurachman, 1971:69).

Dalam bulan Juli 1948 Dewan Rakyat Madura Sementara dilantik di Pamekasan. Dewan ini mempunyai tugas yang sangat berat karena di satu pihak harus bekerjasama dengan Wali Negara dan Pemerintahan Recomba dan di lain pihak harus berusaha memenuhi aspirasi rakyat yang menghendaki supaya kembali kepangkuan NKRI (Abdurachman, 1971:70).

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian yang menggunakan pendekatan historis ini berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses dari pembentukan Negara Madura serta keterlibatan Belanda dalam pembentukan Negara Madura tersebut?

2. Bagaimanakah sikap dan reaksi masyarakat Madura terhadap pembentukan Negara Madura tersebut?
3. Bagaimanakah proses pembubaran dari Negara Madura tersebut untuk selanjutnya kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Nyoman Dekker (1980) bentuk Negara Serikat sebagaimana diwujudkan dengan RIS atas hasil KMB itu, memang bertentangan dengan proklamasi dan UUD 1945 sebagai UUD-nya proklamasi itu. Di dalam perkembangan berikutnya dengan adanya perundingan-perundingan antara Indonesia dan Belanda selanjutnya, bentuk Negara kesatuan ditinggalkan dan diganti dengan bentuk negara serikat. Tindakan semacam ini dapat dipandang sebagai suatu taktik dalam kehidupan negara itu. Sebab yang pokok dalam periode ini adalah pengusiran musuh dari Indonesia. Apabila musuh telah terusir, maka dapatlah kembali disusun segala sesuatunya menurut selera nasional sendiri.

Politik menciptakan nagara-negara bagian ini di Indonesia pada waktu itu disebut oleh Kahin sebagai politik penguasaan yang tidak langsung (*indirect rule*). Artinya, pada hakekatnya yang berkuasa adalah Belanda, tetapi yang melaksanakan adalah orang-orang Indonesia sendiri (Kahin, 1952:54).

Hal senada diungkapkan oleh Wiryoprawiro, menurutnya di daerah Madura kekuasaan Belanda dalam bidang pemerintahan sudah demikian kuat, meskipun secara tidak langsung. Artinya penguasaan Belanda terhadap daerah Madura ini tidak langsung memerintah rakyat, tetapi dengan jalan menguasai dan memerintah para bangsawannya. Dengan demikian maka para adipati di Madura masih tetap memiliki kekuasaan atas rakyat dan daerahnya. Bahkan untuk sumber tenaga militer dalam

rangka politik *divide et impera*, maka justru Belanda mengajarkan adipati-adipati mendirikan pasukan yang cukup kuat untuk menghadapi rakyatnya, namun akan tak kuasa untuk menyerang Belanda (Wiryopawiro, 1986:41-42).

Keperkasaan para sultan di Madura ini akhirnya justru dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung politik *peradevide et imperanya* dengan mengadu domba antar suku di Indonesia. Putra-putra Madura yang perkasa ini justru kemudian dihadapkan untuk memerangi dan menumpas perjuangan kemerdekaan saudara-saudaranya dari suku lain, misalnya dapat dilihat dalam Perang Diponegoro, Perang Bone, Perang Bali, Perang Borneo, dan Perang Paderi. Pengaruh yang demikian besar inilah yang menyebabkan Belanda berusaha untuk membentuk Negara Madura pada masa RIS (Wiryoprawiro, 1986:159).

Menurut Herbert Feith, pembentukan negara federal ini tidak berdasarkan landasan konsepsional. Menurut kenyataannya negara federal itu bermula kepada usaha Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Sudah pasti pembentukannya ditentang oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia. Dalam pada itu ternyata di dalam lingkungan negara-negara bikinan Belanda pun terdapat gerakan *republikein* yang kuat yang berhasrat menegakkan kembali NKRI (Feith, 1962:47).

Sementara itu Irna Arnyla Djafaar (2005) dalam bukunya yang berjudul: *Dari Moloku Kie Raha hingga Negara Federal* yang banyak mengupas mengenai biografi salah seorang tokoh yang memiliki peranan besar dalam pembentukan Negara Indonesia Timur, Sultan ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran beliau tentang negara federal pada saat itusesungguhnya

bertolak dari realita kondisi wilayah Indonesia Bagian Timur, yang masyarakatnya terpecah-pecah pada beribu-ribu pulau. Pemikiran federalisme ini juga dalam rangka mempercepat proses pembangunan wilayah-wilayah di Timur Indonesia yang sangat tertinggal. Buku ini juga berusaha mengungkap pola perilaku Iskandar Muhammad Djabir Sjah yang berideologi federalis. Dengan berlandaskan kepada konsep Moloku Kie Raha yang menjadi falsafah hidup masyarakat Maluku Utara, beliau mempertahankan konsep federalis sampai akhir hidupnya. Beliau setuju bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi system pemerintahannya adalah federal.

Buku lain yang membahas mengenai topik serupa bahkan yang mengilhami penulis untuk meneliti masalah ini adalah buku seri penerbitan naskah sumber arsip yang berjudul: *Pembentukan Negara Madura Tahun 1948 dan Dampaknya Terhadap Republik*, yang diterbitkan oleh Badan Arsip Propinsi Jawa Timur. Buku yang diterbitkan pada tahun 2002 ini ternyata lebih banyak menampilkan arsip-arsip yang membahas masalah tersebut tanpa banyak ulasan. Dengan demikian buku ini lebih banyak menulis ulang dokumen-dokumen arsip yang ada dan disusun secara kronologis. Meskipun begitu buku ini banyak membantu para penulis yang akan meneliti mengenai Negara Madura tanpa harus bersusah payah membuka arsip-arsip lama. Arsip-arsip yang ada dalam buku inilah yang banyak digunakan peneliti dalam membahas masalah sejarah pembentukan Negara Madura ini.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian sejarah ini berusaha untuk mengungkap dan mendiskripsikan mengenai sejarah pembentukan Negara Madura pada tahun 1948 hingga penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara rinci tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Memahami proses pembentukan Negara Madura pada tahun 1948.
2. Memahami keterlibatan pemerintah Hindia Belanda dalam pembentukan Negara Madura.
3. Memahami sikap masyarakat madura terhadap pembentukan Negara Madura.
4. Memahami proses pembubaran dari Negara Madura untuk selanjutnya bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana baru bagi disiplin ilmu sejarah terutama dalam memahami sejarah ketatanegaraan Indonesia. Topik yang dibahas dalam penelitian ini dalam buku-buku sejarah hanya dibahas secara sambil lalu saja. Selama ini seingat peneliti masih sangat sedikit yang membahas mengenai negara-negara federal yang pernah mewarnai sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Demikian juga buku yang membahas Negara Madura seingat penulis belum ada penelitian khusus yang membahas secara panjang lebar mengenai masalah ini, kecuali buku yang disebutkan peneliti di atas

itupun sekedar membukukan arsip-arsip yang ada dan disusun secara kronologis. Dengan demikian diharapkan tulisan ini dapat lebih memperpendek kekosongan dalam masalah yang belum banyak dibahas tersebut.

Tulisan ini sama sekali bukan untuk mengurangi jiwa nasionalisme dari orang-orang Madura, tetapi justru menempatkan pada porsi yang sebenarnya. Sejarah tidak hanya mengupas yang manis-manis saja tetapi juga mengupas masalah-masalah yang kadang-kadang tidak dikehendaki oleh generasi sebelumnya, bukanlah sejarah yang benar adalah sejarah masa kini.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian ilmiah pasti memerlukan metode tertentu sesuai dengan objek penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sejarah. Dalam metode sejarah terdiri dari 4 langkah sebagai berikut:

1. Heuristik (pengumpulan sumber). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa data arsip sejarah yang kebetulan sudah ditulis ulang dan dibukukan dalam seri penerbitan sumber arsip no.2 yang diterbitkan oleh Badan Arsip Propinsi Jawa Timur.
2. Kritik Ekstern yaitu kajian terhadap orisinalitas bahan sumber, dan kritik intern yaitu kajian terhadap isi sumber dalam rangka pengambilan data dan fakta-fakta sejarah dari objek yang diteliti.
3. Interpretasi, yaitu menafsirkan hubungan antar fakta yang telah ditemukan berdasarkan *coherence theory of truth* (teori kebenaran berdasarkan kecocokan).
4. Historiografi, yaitu penyusunan laporan atau hasil penelitian. Pada tahap ini diperlukan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian dan buku-buku teori sosial yang digunakan untuk menganalisa data yang didapat.

Pada proses awal, selain pemilihan topik peneliti juga menyusun rencana kegiatan penelitian, objek penelitian serta permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Penentuan pokok permasalahan sangat penting sebagai pijakan peneliti dalam menelusuri data dan sumber yang diperlukan. Pemilihan topik yang membahas



mengenai sejarah pembentukan Negara Madura hingga penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak diilhami ketika peneliti membaca buku kumpulan arsip yang membahas masalah serupa yang diterbitkan oleh Badan Arsip Propinsi Jawa Timur. Buku ini hanya berisi kumpulan arsip yang ditulis apa adanya sesuai dengan aslinya dan belum ditulis dalam bentuk tulisan sejarah. Dari sinilah maka peneliti tertarik untuk mengolah arsip sejarah ini menjadi tulisan sejarah.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan sumber sejarah. Sumber sejarah yakni bahan-bahan yang dipakai untuk mengumpulkan informasi sejarah. Kegiatan ini dalam ilmu sejarah disebut *heuristic* yang berarti mencari (Hugiono, 1986:30).

Tulisan ini kebanyakan menggunakan arsip-arsip sejarah yang telah dibukukan oleh Badan Arsip Propinsi Jawa Timur Seri Penerbitan Naskah arsip No. 2 yang diberi judul: *Pembentukan Negara Madura tahun 1948 dan Dampaknya Terhadap Republik*. Dengan kata lain buku ini menggunakan sumber sekunder tangan kedua. Biasanya sejarawan harus bertumpu kepada sumber sekunder yang berasal dari buku-buku tangan kedua sejarawan lain untuk memperoleh pengetahuan mengenai latar belakang yang dipergunakan guna mengenali dokumen-dokumen sejaman. Suatu persyaratan untuk menggunakan sumber sekunder ini yaitu perlunya menguji dan mengoreksi sekaligus menganalisanya secara kritis terhadap kesaksian dokumen-dokumen sejaman untuk menghindari yang palsu atau yang menyesatkan.

Tahap penelitian selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Agar penelitian ini lebih objektif, maka sumber yang terkumpul harus diuji otentitasnya, terutama menyangkut materi informasinya. Kritik sumber dilakukan dengan cara melakukan *cross check* terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh dan menganalisanya.

Dalam menganalisa sumber-sumber digunakan teori-teori atau konsep-konsep dan pendekatan ilmu sosial sebagai alat bantu.

Tahap terakhir adalah tahap penulisan, di mana peneliti menyajikan hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan sejarah yang disusun secara kronologis (Kuntowijoyo, 1955:102).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kebijakan van Mook Membentuk Negara-Negara Bagian

Setelah Perjanjian Linggarjati resmi tercapai dengan disahkan oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia yang pada waktu itu sedang berselisih, namun ternyata Belanda masih terus berusaha terus-menerus melaksanakan politiknya untuk menguasai Indonesia.

Pada suatu saat Belanda mengeluarkan suatu interpretasi atas bunyi Perjanjian Linggarjati itu, yang sangat sukar diterima oleh Republik Indonesia. Menurut interpretasinya, sebelum Negara Indonesia Serikat terbentuk nanti pada 1 Januari 1949, harus dibentuk pemerintahan peralihan di Indonesia yang dikepalai oleh Wakil Tinggi Mahkota. Interpretasinya ini ditulis dalam suatu nota yang kemudian disampaikan kepada RI pada tanggal 27 Mei 1947. Nota ini ditolak oleh RI, sebab RI berpendapat bahwa isi nota ini tidak sesuai dengan jiwa Perjanjian Linggarjati.

Sementara itu bangsa Indonesia pada saat bersamaan baru terjadi krisis kabinet di Yogyakarta dengan jatuhnya Kabinet Syahrir yang kemudian diganti dengan Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 3 Juli 1947. Kesempatan ini dipergunakan oleh van Mook untuk mengumumkan sikapnya pada tanggal 20 Juli 1947, dengan menyatakan bahwa dia tidak mau lagi berunding dengan RI dan menyatakan tidak terikat lagi dengan Perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947 malam Belanda melakukan agresi militernya, yang dikenal dengan Agresi Militer I. Belanda sendiri menyebut

agresi ini sebagai *aksi polisional*, dengan alasan bahwa seluruh Indonesia ini adalah wilayah kekuasaannya yang utuh, setelah ia menyatakan diri tidak terikat lagi oleh Perjanjian Linggarjati tersebut.

Agresi ini dilancarkan di Jawa dan Sumatera, yang menurut Perjanjian Linggarjati, *de facto* diakui sebagai wilayah RI. Tujuannya untuk menduduki kota-kota besar dan daerah-daerah yang penting di pulau tersebut. Disamping itu juga untuk mempersempit wilayah RI yang riil. Agresi yang dilancarkan ini berhasil menduduki daerah-daerah penting di Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur (Dekker,1980:54-55).

Serangan-serangan ini mendapat perlawanan dari TNI dan rakyat. Adanya pendudukan daerah-daerah tertentu dari hasil agresinya ini, oleh Belanda dijadikan *fait a compli*, bila nanti diadakan perundingan dengan RI. Dengan cara demikian Belanda berusaha mempunyai posisi yang menguntungkan bila perundingan-perundingan diadakan.

Agresi ini direncanakan oleh van Mook yang kemudian mendirikan negara-negara ciptaannya di wilayah-wilayah hasil agresi itu. Maksudnya untuk mengecilkan arti RI dalam rangka pelaksanaan pembentukan Negara Indonesia Serikat nantinya. Negara bagian pertama yang diciptakan van Mook adalah Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 24 Desember 1946 sebagai hasil dari Konperensi Denpasar. Menurut Perjanjian Linggarjati, maka NIT ini mempunyai kedudukan yang sama dengan RI di dalam rangka "Negara Indonesia Serikat" nanti. Demikian secara tidak langsung, melalui Linggarjati, NIT ini diakui sebagai suatu Negara. Indonesia Timur dipilih sebagai daerah tempat negara bagian pertama yang dibentuk dengan

pertimbangan karena kekuatan militer Belanda relatif besar di daerah ini, lagi pula Belanda benar dalam penilaiannya bahwa gagasan negara federal akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi rakyat di luar pulau-pulau Jawa, yang sudah agak cemas akan dominasi politik oleh orang-orang Jawa, yang jumlahnya jauh lebih besar itu (Silar, 1989:126). Salah satu tokoh yang memiliki peranan besar dalam hal ini adalah Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Syah. Dengan demikian sewaktu ditawarkan untuk membentuk sebuah negara dengan faham federalis, ia langsung menyetujui dengan mengikuti berbagai macam konferensi yang diadakan untuk membentuk negara federalis tersebut. Sebenarnya untuk kepentingan Sekutu terutama Amerika, Sultan Ternate telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Indonesia Timur bila Jepang tidak dapat dikalahkan pada tahun 1945. Jadi Indonesia Timur akan dijadikan suatu wilayah pemerintahan sendiri dengan kepala pemerintahan Sultan Ternate, tetapi setelah Jepang menyerah sesuai rencana, tahun 1945, maka Belanda merubah kesepakatan antara Sultan dan Jenderal Mac Arthur dengan membentuk Negara Indonesia Timur (Djafaar, 2005:104).

Wilayah NIT ini meliputi : Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, tanpa Irian Barat (Papua). Banyak utusan yang hadir dalam Konferensi Denpasar ini merasa tidak puas dengan status Papua yang dipisahkan dengan dari NIT tersebut. Anak Agung Gede Agung mengecam dengan pedas ketentuan pemisahan ini. Namun bagaimanapun juga kemudian Belanda lewat van Mook yang menang.

NIT setelah terwujud kemudian ikut bermain di dalam percaturan politik di Indonesia. Sikapnya terhadap RI kadang-kadang positif dan kadang-kadang negatif,

dan ini tergantung dari tokoh-tokoh yang memegang peranan penting di dalam negara tersebut.

Van Mook pada salah satu kesempatan pernah menjabarkan perbedaan antara dua sistem yaitu unitarisme dan federalisme. Dalam sistem unitarisme biaya pemerintahan akan menjadi lebih murah daripada sistem federal, tetapi akan timbul bahaya bahwa satu bagian akan dapat menguasai bagian lainnya. Dalam keadaan demikian perpecahan mungkin akan timbul. Oleh karena itu sistem federal dalam susunan ketatanegaraan akan lebih baik, tetapi dengan suatu syarat bahwa bagian-bagian yang akan merupakan kompone.n-komponen dari federasi itu haruslah merupakan wilayah-wilayah yang luas dan mempunyai potensi ekonomi, sosial, dan politik yang cukup mantap. Hanya bagian dari suatu federasi yang demikian akan mempunyai cukup kekuatan hidup untuk menunjang federasi itu menjadi suatu kesatuan yang kuat. Jadi apabila akan diwujudkan suatu sistem federal, maka melihat tugas dan kewajiban pemerintahan begitu luas harus diputuskan agar bagian-bagian federasi terdiri dari wilayah yang cukup luas.

Dalam Konferensi Malino bentuk federasi sebagai sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dijadikan pokok bahasan utama dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini. Semua wakil-wakil daerah turut serta dalam pandangan umum itu. Para pembicara dapat dibagi antara yang menyatakan simpatinya terhadap Republik Indonesia dan menandakan bahwa perkembangan wilayah yang mereka wakili tidak dapat dipisahkan dari apa yang terjadi di Jawa dan Sumatera. Pendapat ini dinyatakan oleh wakil dari Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan termasuk Maluku Utara.

Kesimpulan dari konferensi ini adalah masalah bentuk tata pemerintahan dan susunan kenegaraan yang cocok untuk Indonesia. Semua wakil daerah condong untuk mewujudkan sistem federal di mana Indonesia akan terbagi atas bagian-bagian yang besar untuk dapat diberikan tugas dan wewenang pemerintahan yang luas oleh pemerintah pusat. Untuk mencapai cita-cita agar pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat yang diwakili dapat tercapai, maka sambil memperhatikan perkembangan politik setempat guna menghindarkan kekacauan di wilayahnya masing-masing, mereka bersedia bekerjasama dengan Belanda, maka pembaharuan di bidang tata pemerintahan dan pembangunan ketatanegaraan segera harus diwujudkan dengan memperhatikan realitas politik di wilayahnya masing-masing, untuk menormalisasi kehidupan rakyat di bawah pemimpin-pemimpin yang berpandangan realistis. Maka untuk mencapai cita-cita ini mereka sepakat bahwa sistem pemerintahan federal yang paling cocok, dan oleh karena itu sistem federal ini didukung oleh semua wakil-wakil daerah yang datang untuk ikut berpartisipasi. Wakil-wakil "daerah Malino" tersebut turut serta dalam Konferensi Malino itu terutama disebabkan keinginan mereka untuk mewujudkan suatu formula atau gagasan politik dengan jalan berdialog dengan pihak Belanda sambil memperhatikan perkembangan politik setempat guna menghindarkan kekacauan di wilayah tersebut. Selama menunggu terwujudnya status politik Indonesia yang kemudian dapat disetujui oleh semua golongan dan rakyat Indonesia, mereka bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Belanda untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat yang mereka wakili, terutama di bidang tata pemerintahan dan pembangunan ketatanegaraan sesegera mungkin. Untuk mencapai cita-cita itu mereka menganggap sistem pemerintah federal yang

paling cocok untuk daerahnya masing-masing, dan oleh karena itu sistem federal didukung oleh semua wakil daerah dalam Konferensi Malino tersebut (Djafaar,2005:111-112).

Konferensi Malino yang diikuti oleh 18 perwakilan dari seluruh daerah Indonesia Timur, kebanyakan diwakili oleh Raja ataupun Sultannya. Mulai dari Konferensi Malino, sudah tergambar perbedaan yang menyolok antara Sultan ternate dan peserta lainnya yang mewakili Maluku Utara, yaitu Dr. Chasan Bousoiri dan Salim adjiduddin. Di satu sisi Sultan Ternate setuju dengan ide federalisme, sementara kedua orang lainnya sangat bersimpati dengan negara kesatuan.

Sesuai kesepakatan, setelah Konferensi Malino akan dilanjutkan dengan konferensi selanjutnya yang akan diadakan di Bali, tepatnya di Denpasar. Konferensi ini mempunyai wewenang berdasarkan keputusan Konferensi Malino untuk menyusun tata pemerintahan dan ketatanegaraan baru di wilayah Timur Besar melalui perundingan-perundingan dan pembicaraan-pembicaraan dengan wakil-wakil Pemerintah Belanda. Dalam konferensi ini diadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan mengenai susunan ketatanegaraan di Timur Besar, dimana Komisaris Pemerintahan Umum untuk Kalimantan dan Timur Besar memajukan suatu kertas kerja yang berisi konsep peraturan-peraturan tentang pembentukan Negara Timur Besar sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat.

Antara Konferensi Malino dan Konferensi Denpasar terdapat perbedaan nyata. Dalam Konferensi Malino pembicaraan-pembicaraan masih bersifat umum dan menyangkut masalah politik, ekonomi, social, dan budaya di Indonesia pada umumnya. Dalam Konferensi Denpasar pembicaraan dipusatkan pada satu masalah pokok, yaitu

pembentukan susunan ketatanegaraan di wilayah Timur Besar di mana sudah tersedia suatu kertas kerja berupa rencana peraturan pembentukan Negara Timur Besar yang disiapkan oleh Komisariat Umum untuk Kalimantan dan Timur Besar. Sama halnya dengan Konferensi Malino, Konferensi Denpasar pun diawali dengan pidato Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda van Mook, yang menekankan lagi tentang penduduk Negara Indonesia Timur yang mempunyai potensi yang sangat besar baik dari segi ekonomi maupun kebudayaan (Anak Agung, 1985: 101).

Van Mook yakin bahwa Indonesia Timur akan dapat menjelma menjadi suatu negara yang mempunyai daya hidup yang kuat dan akan dapat mengembangkan identitasnya sendiri sehingga akan berhasil menjadi bagian yang berharga dari federasi Indonesia yang akan diwujudkan sebagaimana yang diinginkan semua pihak. Menurutnya sistem pemerintahan yang paling cocok untuk Indonesia adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan federasi. Oleh karena dengan system itu akan dapat dihindarkan suatu pemerintahan yang sentralistis, yang mungkin dapat mencekik suatu perkembangan yang demokratis.

Mulai saat inilah maka kemudian van Mook (terutama setelah terjadi Agresi Militer I) berusaha untuk mendirikan negara-negara bagian berikutnya, yaitu;

1. Negara Sumatera Timur, pada tanggal 25 Desember 1947 dengan Dr. Mansyur sebagai

wali negaranya. Kemudian setelah diadakan Perjanjian Renville menyusul didirikan:

2. Negara Madura, pada tanggal 20 Februari 1948 dengan Cakraningrat sebagai kepala negaranya.

3. Negara Pasundan, pada tanggal 24 April 1948 dengan Wiranatakusuma sebagai wali

negaranya.

4. Negara Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Agustus 1948 dengan Abdul Malik sebagai

kepala negaranya.

5. Negara Jawa Timur, pada tanggal 26 Nopember 1948 dengan Kusumonegoro sebagai kepala negaranya.

Disamping mendirikan negara-negara federal di atas van Mook juga membentuk daerah-daerah otonom seperti: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah.

Dengan berhasilnya membentuk negara-negara bagian ini menandakan pula keberhasilan Belanda dalam politik *divide et imperanya*. Politik menciptakan negara-negar bagian di Indonesia pada waktu itu, oleh Kahin disebut sebagai politik penguasaan yang tidak langsung (*indirect rule*). Artinya pada hakekatnya yang berkuasa adalah Belanda, tetapi yang melaksanakannya adalah orang-orang Indonesia sendiri (Nyoman Dekker: 55-56).

2. Beban Sejarah dari Keinginan Membentuk Negara Madura

Dalam menjelaskan mengapa beberapa pemimpin lokal Madura seperti Cakraningrat memiliki keinginan untuk membentuk Negara Madura yang terlepas dari RI yang ada di Jawa, sebenarnya dapat dijelaskan dalam hubungan antara penguasa Madura dan penguasa Jawa (Mataram) pada masa kerajaan. Meskipun secara geografis wilayah Madura terpisah dengan Jawa, namun secara kekuasaan Madura pada jaman kerajaan selalu berada di bawah kerajaan-kerajaan besar di Jawa terutama Mataram.

Madura pada waktu itu bukanlah sebagai wilayah yang bebas dari kekuasaan Jawa bahkan harus tunduk. Ketakutan terhadap dominasi Jawa ini rupanya menjadi beban sejarah yang terus teringat dalam pemikiran pemimpin-pemimpin lokal Madura, ketika ia harus memilih menurut keinginan Belanda untuk memisahkan diri dengan membentuk Negara sendiri terpisah dari Negara RI atau memilih bergabung dengan negara RI sebagai Negara kesatuan yang ada di Jawa. Kondisi yang demikian semakin diperkuat oleh pernyataan-pernyataan yang dikemukakan van Mook mengenai besarnya potensi Madura apabila mau berdiri sendiri sebagai negara terpisah dari kekuasaan pusat RI yang ada di Jawa.

Berbagai ketegangan yang mengganggu hubungan antara pusat kerajaan dan daerah kekuasaannya telah terjadi semenjak awal berdirinya Mataram, termasuk dengan para penguasa di Madura. Sesudah perlawanan Trunajaya pada tahun 1680 berhasil dipatahkan, wilayah Madura oleh Pakubuwana I dipecah menjadi tiga kerajaan kecil. Sebagian di bawah Cakraningrat III, dua bagian lainnya diberikan kepada Tumenggung Suryawinata, dan Tumenggung Sasrawinata (kemenakan Cakraningrat III). Hubungan antara Mataram dan Madura menjadi tegang kembali karena Cakraningrat III yang meminta bantuan kekuatan dari Bali bersekutu dengan Adipati Jayapuspita, melakukan perlawanan terhadap Mataram maupun VOC.

Ketika Cakraningrat III meninggal dunia dan tahta kerajaan digantikan oleh saudaranya yakni Cakraningrat IV, ternyata kebijakannya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Penguasa baru di Madura itu juga mengikuti jejak tetangganya, Sumenep dan Pamekasan untuk berusaha melepaskan diri dari subordinasi Mataram, dan secara sukarela meminta VOC agar bersedia bertindak sebagai pelindungnya.

Sudah tentu Cakrajaya sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap integritas dan keutuhan wilayah Mataram berusaha mencegah maksud Cakraningrat IV di atas dengan berbagai cara.

Tindakan untuk memisahkan diri para penguasa Madura dari belenggu ikatan Kerajaan Mataram itu tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi di pulau itu. Meskipun secara geografis hampir seluruh Madura terdiri dari tanah kapur sebagai bagian dari pegunungan kapur utara di bagian utara Jawa Timur, akan tetapi tampaknya pada awal abad ke-18 Madura merupakan pulau yang makmur. Hal ini terbukti di pulau itu terdapat tidak kurang dari lima kota yang kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya bila dibandingkan dengan perkembangan beberapa kota di Jawa kondisinya tidak jauh berbeda.

Terhadap masalah kemakmuran Madura pada abad ke-17 dan 18 dan penghargaan raja-raja Mataram juga tercermin dari status yang diberikan kepada pangeran di pulau itu. Sampai dengan Cakraningrat IV dalam pandangan raja-raja Mataram termasuk salah seorang penguasa atau pangeran yang terkemuka pada jaman itu. Para pangeran itu oleh raja-raja Mataram dianggap sangat berpengaruh dan memiliki kekuatan yang besar di daerahnya.

Sepeninggal Amangkurat II, tahta kerajaan Mataram jatuh ke tangan Amangkurat III, ternyata para pembesar Mataram khususnya Puger dianggap tidak dapat bekerjasama dengan penguasa Madura itu. Dalam kesempatan tersebut Cakraningrat II justru berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mataram serta meminta perlindungan kepada VOC agar kongsi dagang itu bersedia mengakui sebagai bawahannya.

Kebesaran penguasa Madura ternyata juga masih tercermin sampai pada permulaan abad ke-19, tatkala wilayah pulau tersebut telah lepas dari kekuasaan Mataram dan menjadi salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Hindia Belanda di pesisir utara dan ujung timur Jawa. Dalam revolusi tertanggal 1 September 1808 yang mengatur dan membatasi penghasilan, jumlah, dan jenisnya, serta penggunaan tenaga rakyat oleh para bupati. Ternyata Madura yang diwakili oleh bupati Sumenep ditempatkan sejajar dengan bupati-bupati lain, misalnya Semarang, Demak, Pekalongan, Tegal, Pati, dan Surabaya (Kasdi: 253-254).

Dengan demikian selama perkembangan perdagangan laut atau abad niaga (*The age of Commerce*) di Asia Tenggara, Madura mengalami perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sangat pesat, padahal secara geografis lahan pertanian di Madura bukanlah bandingan dari lahan di pulau Jawa. Perkembangan yang dicapai oleh Madura tersebut tidak dapat dipisahkan dari peranannya di sektor perdagangan internasional, yang jalurnya juga melewati sepanjang pulau itu. Lain dari pada itu tampaknya kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh para penguasa dan rakyat Madura untuk ikut terlibat dalam kegiatan perniagaan tersebut misalnya sebagai penyedia komoditi buah-buahan, garam, dendeng, ikan, pakaian, asam Jawa, jagung, kulit, dan papan. Karena itu tidaklah mengherankan bila Madura mendapat beban berat yaitu penyerahan wajib baik dalam bentuk penyerahan barang maupun uang dalam jumlah besar. Beban penyerahan wajib tersebut tidak mustahil menjadi penyebab utama mengenai sikap penguasa Madura seperti Trunajaya, Cakraningrat II, Cakraningrat III, dan Cakraningrat IV untuk berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, yang boleh jadi secara ekonomis dirasa sangat membelenggu atau mencekiknya.

Beban sejarah kedua yang memiliki pengaruh besar beberapa pemimpin lokal Madura lebih tertarik untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan Belanda sehingga mau untuk mendirikan negara yang terpisah dari pada bergabung dengan RI sebenarnya tidak lepas dari hubungan-hubungan diantara keduanya yang sudah berjalan lama. Ketika mereka konflik dengan penguasa Jawa maka pemimpin Madura akan memilih alternatif untuk minta bantuan Belanda. Kerjasama antara pemimpin Madura dengan Belanda salah satunya dapat dilihat pada organisasi militer yang dikenal dengan sebutan Barisan Madura. Organisasi barisan ini merupakan suatu pasukan militer yang keberadaannya diterima dengan adanya hubungan militer antara penguasa Madura dengan Belanda. Organisasi ini berasal dari jasa militer yang disediakan oleh penduduk Madura. Dijadiakannya barisan sebagai suatu institusi khusus dengan maksud untuk melayani kepentingan-kepentingan penguasa kolonial. Sejarah aliansi militer antara Madura dan Belanda dimulai pada tahun-tahun awal Belanda masuk ke Madura, yang pada saat itu pula kerajaan-kerajaan Madura sedang berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Mataram. Usaha ini mendapat respon positif dan perlindungan dengan dari Belanda. Sebagai gantinya maka kekuatan-kekuatan militer Madura diminta untuk mendampingi Belanda selama menghadapi berbagai pemberontakan, seperti Perang Diponegoro, Perang Bone, Perang Paderi, Perang Bali, dan lain-lainnya (Kuntowijoyo,1988:144).

Atas penghargaanannya dalam membantu perang ini maka Sultan dan keluarganya mendapat berbagai penghargaan. Bahkan karena sangat cintanya kepada Belanda beberapa Sultan ketika meninggal dunia berwasiat agar jenazahnya ditutupi dengan bendera Belanda (Wiryoprawiro, 1986: 29).

3. Pembentukan Negara Madura

Pada akhir tahun 1947 Belanda menduduki kembali Indonesia. Selama pendudukan Belanda yang menjalani kekuasaan militer maupun pemerintahan berganti-ganti, seperti *Hoof Tijdelijke Bestuuriens* (HTB), *Regerings Commisaris voor Bestuurs aangeleggheden* (*Recomba*) dan seterusnya. Pasukan Belanda pada tanggal 11 September 1947 jam 06.30 pagi melakukan serangan besar-besaran ke Madura, Gerakan pasukan di mulai dari Pakong, Distrik Pegantenan dengan kekuatan 1 kompi infanteri, menyerang Sumenep.

Sebelum melakukan serangan Belanda melakukan ofensif propaganda pada tanggal 1 November 1947 dengan taktik seolah-olah pasukan mereka ditarik mundur. Pada tanggal 9 November 1947 pasukan Belanda melakukan tipu muslihat dengan kapal perangnya mendekati dan menembaki Pasongsongan, Pasiyan, dan Ambunten. Sumenep dapat diambil alih oleh belanda pada tanggal 15 November 1947 dengan sasaran Kalianget.

Rakyat Madura bersama-sama dengan Barisan Cakra di seluruh Madura terus melakukan perlawanan dengan menghancurkan basis-basis musuh. Barisan Cakra yang ada di seluruh Madura terdiri dari 3 Batalion dengan gelar *Veliligheids Batalion* (V.B) dengan tiap-tiap batalion sekitar 1.000 orang yang ditempatkan di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep (Sumber: Arsip Kementrian Penerangan No. 99).

Setelah pertahanan di Madura tidak dapat dipertahankan lagi maka Letnan Baron van de Linde (komandan tentara pendudukan di Pamekasan) datang ke Pagantenan, pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Madura untuk minta kesediaan Residen Cakraningrat bekerja sama dengan Belanda. Waktu itu Cakraningrat menolak.

Pada waktu selanjutnya ketika Cakraningrat berada di Sampang, Recomba Jawa timur Ch. O. van de Plas bersama-sama dengan Mayor Sitters Komandan Tentara Belanda di Madura menjumpai Residen Madura. Dalam pembicaraan itu disepakati bahwa Cakraningrat tetap menjadi Residen Madura, tetapi langsung bertanggung jawab kepada Recomba Jawa Timur.

Sementara itu pada bulan Desember 1947 di Jakarta terbentuklah Komite Indonesia Serikat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil negara bagian dan tokoh-tokoh politik termasuk di dalamnya wakil dari Madura. Komite ini memiliki tugas untuk membentuk Negara Indonesia Serikat. Berdasarkan surat dari Residen Recomba Madura kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Komite Penentuan Kedudukan Madura di Pamekasan dijelaskan bahwa atas desakan berbagai golongan rakyat, maka pada tanggal 14 Januari 1948 di Pendopo Kabupaten Bangkalan berkumpul beberapa orang terkemuka Madura. Dari hasil perundingan itu terbentuk sebuah Komite Sementara Penentuan Kedudukan Madura yang terdiri dari 3 orang wakil dari Pamekasan, 3 orang wakil dari Sumenep, 2 orang wakil dari Sampang, dan 3 orang wakil dari Bangkalan. Sebagai penasehat ditunjuk Ario Cakraningrat yaitu Residen Recomba Madura. Komite ini diberi tugas dan kewajiban untuk merundingkan di tiap-tiap daerahnya masing-masing dengan pemuka masyarakat guna dapat menyusun komite tetap dengan cara yang demokratis. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 1948 bertempat di kediaman Bupati Pamekasan terbentuk sebuah Komite Penentuan Kedudukan Madura yang tersusun sebagaimana komite sementara yang terdiri dari utusan rakyat di seluruh Karesidenan Madura.

Komite juga menetapkan sebuah resolusi akan segera diadakan pemungutan suara di tiap-tiap desa di seluruh Karesidenan Madura yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 Januari 1948 jam 15.00 sore. Ditetapkan pula mengenai orang-orang yang berhak memberikan suaranya, yaitu tiap penduduk desa laki-laki yang sudah berumur 18 tahun ke atas atau sudah kawin.

Cara yang akan dilakukan dalam pemungutan suara adalah tiap-tiap desa pada tanggal 23 Januari 1948 terlebih dahulu akan diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari pemungutan suara itu. Dari pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 1948 mulai pukul 15.00 sampai 18.00 diperoleh hasil sebagai berikut:

Orang yang berhak memberikan suara	: 305.546 orang
Orang yang hadir	: 219.660 orang (71,88%)
Orang yang menyatakan setuju	: 199.510 orang (90,82 %)
Orang yang tidak setuju	: 9.923 orang (4,51%)
Orang yang tidak mengeluarkan suara	: 10.230 orang. (4,65 %)

Dari hasil pemungutan suara itu maka terlihat 71, 88 % rakyat setuju Madura berdiri sebagai negara sendiri (Negara Madura) yang terpisah dari Negara RI. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara pihak Belanda banyak bermain dengan cara melakukan berbagai tekanan, diantaranya dengan menangkap dan menahan beberapa orang yang tidak disukai.

Pada tanggal 29 Januari 1948 Komite melaporkan hasil pemungutan suara ini dan meminta kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia agar segera mengakhiri kedudukan dan status Madura sebagai wilayah bagian dari RI dan mengakui Madura sebagai negara sendiri (Negara Madura) yang terlepas dari RI serta

mengangkat Ario Cakraningrat sebagai Wali Negara (Arsip Kementerian Penerangan No.99 dikutip dari Seri Penerbitan Naskah Sumber Arsip No.2 Badan Arsip Propinsi Jatim 2002:17-18).

Pada tanggal 20 Februari 1948 surat dari Komite Penentuan Kedudukan Madura ini mendapat jawaban dari van Mook selaku wakil Pemerintah Belanda yang intinya sangat menyetujui dan mengabulkan permohonan tersebut. Dengan demikian maka pada tanggal tersebut secara resmi berdiri Negara Madura sebagai negara bagian yang terpisah dari RI. Ditetapkan pula bahwa daerah Negara Madura meliputi Pulau Madura dan pulau sekitarnya. Selain juga telah ditunjuk Wali Negara Madura yaitu R.A.T. Cakraningrat.

Dalam pembicaraan pada sidang tanggal 16 Januari 1948 disepakati bahwa sejak tanggal 11 November 1947 hubungan antara Madura dan Pemerintah pusat RI telah terputus, oleh karena itu sejak tanggal 21 November 1947 negara dan pemerintah diambil alih oleh R.A.A. Cakraningrat. Corak dari pemerintahan adalah pemerintahan sendiri dengan bekerja sama dengan pemerintah umum. Pemerintah masih bersifat sementara sehingga perlu ada ketentuan pasti tentang kedudukannya. Menimbang dari hal di atas maka diputuskan pula bahwa: rakyat Madura berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehubungan dengan keadaan politik Indonesia pada saat itu, mereka sudah saatnya untuk menetapkan status dan kedudukan Madura.

Dalam resolusi tersebut di atas diputuskan perlunya permintaan persetujuan pada rakyat Madura mengenai pokok-pokok kesimpulan pendapat dari Komite Penentuan Kedudukan Madura sebagai berikut:

1.. Menyatakan bahwa hubungan antara Madura dan Republik Indonesia terputus.

2. Menetapkan kedudukan (status) Madura bercorak Negara Merdeka, bagian dari Indonesia Serikat.
3. Menunjuk Sis Cakraningrat Bupati Bangkalan sebagai utusan Madura dalam Komite Indonesia Serikat.
4. Memohon kepada Cakraningrat bersedia memegang pimpinan Pemerintahan Negara Madura sebagai Wali Negara.
5. Mengusahakan kepada Wali Negara Madura dan Komite Penentuan Kedudukan Madura untuk: menyusun dan menetapkan corak dan bentuk pemerintahan yang berdasarkan demokratis menurut azas umum dalam Perjanjian Linggarjati, menambah utusan Madura dalam Komite Indonesia Serikat sebanyak-banyaknya 3 orang, dan menambah jumlah anggota Komite Penentuan Kedudukan Madura.
6. Memohon kepada Pemerintah Belanda untuk mengakui kedudukan (status) Madura (Sumber: Arsip Kementrian Penerangan No. 99 dikutip dari Seri Penerbitan Naskah Sumber Arsip No.2. Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2002: 25-26).

Sementara itu pada tanggal 15 April 1948 telah diadakan juga pemilihan Dewan Perwakilan Negara Madura. Dalam bulan Desember 1948 Dewan Rakyat Madura Sementara ini telah dilantik di Pamekasan.

4. Sikap dan Reaksi Masyarakat Madura terhadap Pembentukan Negara Madura

Telah kita ketahui bahwa dengan disetujuinya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, maka terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Diantara Negara-

negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak yakni Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur. Sebagai Presiden atau Kepala Negara yang pertama RIS adalah Sukarno, sedangkan Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri yang pertama. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet ini antara lain dari pihak Republik Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof Dr. Supomo, dr. Leimena, Arnold Mononutu, Ir. Herling Laoh, sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung.

Kabinet ini merupakan *Zaken Kabinet* (yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya) dan bukan kabinet koalisi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Anggota-anggota kabinet ini sebagian besar pendukung unitarisme dan hanya 2 orang mendukung system federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung. Oleh karena itu gerakan untuk membubarkan negara federal dan membentuk negara kesatuan semakin kuat. Lebih-lebih karena pembentukan negara federal itu tidak berdasarkan landasan konsepsional. Menurut kenyataannya negara federal itu bermula dari usaha Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Sudah pasti pembentukannya ditentang oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia. Dalam pada itu ternyata di dalam lingkungan negara-negara bikinan Belanda pun terdapat gerakan Republikein yang kuat yang berhasrat menegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Marwati Djoened Poesponegoro, 1992: 206).

Mengenai pembentukan Negara Kesatuan terjadi setelah Pemerintah Negara Indonesia Timur dan pemerintah Negara Sumatra Timur Menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam wilayah Negara Kesatuan RI. Kedua negara bagian

tersebut memberikan mandatnya kepada Pemerintah RIS guna mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan Negara Kesatuan dengan Pemerintah RI. Keinginan untuk bergabung kembali ke dalam wilayah Negara Kesatuan RI ini kemudian juga muncul dari wilayah negara bagian lainnya, termasuk dari Negara Madura.

Reaksi masyarakat Madura terhadap pembentukan Negara Madura yang berdiri sendiri sebagai negara federal terpisah dari Negara Republik Indonesia sebenarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagian menyetujui dan sebagian menolak.

Reaksi dari orang atau kelompok rakyat yang menyetujui berdirinya Negara Madura berasal dari mereka-mereka yang merasa diuntungkan ketika wilayah Madura dikuasai Belanda terutama yang berasal dari pejabat-pejabat lokal seperti Cakraningrat. Pejabat-pejabat lokal yang demikian inilah yang kemudian dijadikan alat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk tetap berkuasa di Indonesia dengan jalan memecah belah rakyat Indonesia diantaranya dengan usaha membentuk negara federal.

Reaksi dari rakyat Madura yang menolak terhadap berdirinya Negara Madura diwujudkan dalam bentuk berdirinya organisasi gerakan perjuangan hingga dalam bentuk aksi massa. Salah satu organisasi yang sangat keras terhadap pembentukan Negara Madura adalah Gerakan Perjuangan Madura. Organisasi ini telah mendapat pengakuan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Badan Perantara urusan Daerah Madura yang berpusat di Yogyakarta. Organisasi yang berpusat di Pamekasan ini memiliki cabang diberbagai tempat seperti Surakarta, Madiun, Nganjuk, Kediri, Blitar, Turen, Jombang, Babat, dan Tuban. Di dalam pasal 8 Anggaran dasar Gerakan Madura disebutkan bahwa yang dapat menjadi anggotanya adalah putra Indonesia Madura

maupun tiap warga Negara Indonesia yang menyertujui dan menaruh minat terhadap asas dan tujuan perjuangan rakyat Madura.

Tujuan utama dari Gerakan Perjuangan Madura adalah sebagai berikut ini:

1. Menggerakkan golongan Madura untuk memperjuangkan kepentingan Pulau Madura dan rakyat di dalam lingkungan Republik Indonesia.
2. Mengintensifkan rakyat Madura, baik di daerah pendudukan maupun di daerah republik.
3. Memberikan kesadaran kepada rakyat akan kepentingannya untuk memilih Republik dan mempertahankan Republik Indonesia.
4. Menunjang segala usaha Negara di dalam melaksanakan Persetujuan Renville.
5. Memperhatikan nasib dan kepentingan anggotanya.

Jika dilihat dari tujuan di atas secara tegas tujuan dari gerakan ini adalah menggerakkan rakyat Madura untuk memperjuangkan perjuangan pulau Madura dalam lingkungan Negara Republik Indonesia. Selain itu juga berupaya menyadarkan rakyat Madura baik di daerah pendudukan maupun Republik untuk memilih dan mempertahankan Negara Republik Indonesia.

Perjuangan untuk mempertahankan Pulau Madura agar tetap berada di bawah Negara Republik Indonesia ternyata juga bukan hanya dilakukan oleh rakyat Madura yang ada di Pulau Madura saja, tetapi juga dilakukan oleh putra-putra Madura yang tinggal di daerah lain. Pada tanggal 26 Pebruari 1948 putra-putra Madura yang ada di Jawa telah membentuk komunike yang diberi nama Panitia Perjuangan Madura, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : R. Sosrodanorkusumo

- Wakil ketua : Tabrani
- Bendahara : R. Senosastro
- Panitia I : M. Kafrawi
- Panitia II : Isckak
- Pembantu : 1. R. Safiudin dan R. Abdul Hajat (untuk Yogyakarta)
: 2. R. Ruslan wongsokusumo (untuk Blitar)
: 3. K. Aminuddin Djakfar (untuk Kediri)
: 4. R. Iljas (untuk Toeren)
: 5. R.P. Moh. Noor dan R. Sulaiman (untuk Babad).

Selain dengan jalan membentuk organisasi pergerakan, pada tanggal 15 Februari atas inisiatif dari Front Nasional Pemuda Madura diadakan demonstrasi yang diikuti oleh sekitar 25.000 orang yang berasal dari massa Front Nasional Pemuda Madura, Pemuda 17 A Daerah Madura, Gerakan pemuda Indonesia Daerah Madura, dan Persatuan Pelajar Indonesia Daerah Madura. Tuntutan dari demontarsi ini adalah:

1. Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Madura
2. Mengajukan dan memaki Wali Negara meletakkan jabatan dan kekuasaan
3. Menghendaki Madura bergabung kembali ke daerah Republik Indonesia.

Pada tanggal tersebut sekitar pukul 09.45 massa demonstrasi mulai bergerak dari sekolah pertanian Pamekasan menuju gedung DPR terus keliling menuju jalan Sumenep-Mamen-Kelon-Sedangtang-Alun-alun, dan kemudian menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada saat DPR bersidang, massa demonstran memasuki ruang sidang dan memaksa para anggota DPR mulai untuk segera meletakkan jabatannya selaku Wakil

Rakyat. Mulai tanggal 15 Desember 1950 jam 10.25 pagi Dewan Perwakilan Rakyat Madura harus dibubarkan. Tuntutan tersebut disampaikan oleh Hafid dan Zainal Atlas. Ketua DPR. Abdul Gafon menerima tuntutan tersebut dan akan memusyawarahkan kepada dewan lainnya.

Pernyataan dari Ketua Dewan ini sama sekali tidak diindahkan oleh para demonstran. Ketika para anggota dewan hendak meneruskan sidangnya, para demonstran menghalau dewan supaya secepat mungkin meninggalkan sidang.

Massa demonstran terus mendesak dan berteriak berkali-kali minta pembubaran dewan. Melihat reaksi dari para demonstran maka dengan suara aklamasi sidang mengambil keputusan menyetujui tuntutan rakyat untuk bubarnya dewan.

Untuk pelaksanaan pembubaran Negara Madura, maka dibentuklah Panitia Pelaksana Resolusi DPR Madura, yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil DPR Madura dan organisasi rakyat. Setelah bersidang beberapa kali panitia bersepakat setelah Negara Madura dibubarkan segera akan menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 28 Januari 1950, Wali Negara telah siap untuk menyerahkan kekuasaannya kepada DPR Madura. Akan tetapi DPR Madura atas penyerahan tersebut berpendapat tidak dapat menerima penyerahan kekuasaan Wali Negara dan menganjurkan supaya Wali Negara menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Di dalam penyerahan kekuasaan pada prinsipnya tidak ada pertentangan pendapat antara organisasi rakyat dengan Parlemen Madura. Hanya saja ada perbedaan pelaksanaan yakni organisasi rakyat menghendaki pelaksanaan penyerahan kekuasaan Wali Negara cukup disampaikan kepada Mr. Indrakusuma sebagai perwakilan RIS di

Madura. Sementara itu parlemen Madura berpendapat bahwa cara demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas dasar konstitusi. Penyerahan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan mempergunakan pasal 54 UUDS kepada pemerintah RIS.

Sebagai usaha untuk mengatasi persoalan tersebut Wali Negara Madura mengundang Menteri Dalam Negeri RIS untuk berkunjung ke Madura. Pada tanggal 9 Februari 1950 Menteri Dalam Negeri RIS, Mr. I Anak Agung bersama-sama dengan Mr. Indrakusuma datang ke Madura dan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Pemerintah Negara Madura, wakil-wakil DPR Madura dan wakil-wakil Organisasi rakyat. Kesimpulan hasil pembicaraan tersebut diumumkan sebagai berikut:

1. Penetapan status Negara Madura harus berdasar pasal 43 dan 44 UUDS RIS.
2. Ditugaskan kepada Mr. Indrakusuma, Komisaris pemerintah Urusan Umum untuk:
 - a. Mengadakan penyelidikan tentang keadaan aliran politik/masyarakat di Madura, terutama untuk persiapan guna pelaksanaan Undang-undang Federal yang didasarkan pada pasal 43-44 UUDS RIS.
 - b. Mengawasi suasana keadaan di Madura dan memberi bantuan pada Pemerintah Negara Madura.
 - c. Mengadakan hubungan diantara Pemerintah Negara Madura dan rakyat Madura dengan Pemerintah Pusat.

Kesimpulan hasil pembicaraan yang dikeluarkan oleh Komite Menteri Dalam Negara RIS ternyata sama sekali tidak memuaskan kepada sebagian besar rakyat terutama bagi pemuda-pemudanya. Pada tanggal 12 Februari 1950 Front Nasional Pemuda Koordinasi seluruh Madura mengeluarkan resolusi sebagai berikut:

1. Peraturan Tata Negara Madura tidak sesuai lagi dengan keinsyafan hukum rakyat Madura.
2. Langsung diserahkannya kekuasaan Wali Negara kepada DPR sebagai SK tanggal 28 Januari 1950 No. 14 adalah suatu usaha untuk memperlambat pembubaran Negara Madura sebab DPM tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan Negara.
3. Tetapnya Wali Negara memegang kekuasaan berarti timbul kembali disharmoni diantara rakyat, pemerintah, dan DPR Madura (Abdurachman,1988:73).

Karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap resolusi Front Pemuda, maka pada tanggal 15 Februari 1950 diselenggarakan demonstrasi besar-besaran untuk membubarkan Negara Madura. Yang memegang peranan dalam demonstrasi itu sebenarnya adalah pemuda-pemuda yang tergabung di dalam "gerakan bawah tanah".

Pada pukul 10.00 pagi demonstran-demonstran menuju kegedung DPR Madura dan menuntut supaya dewan segera dibubarkan. Demonstrasi mulai tidak teratur, emosi mereka tidak tertahankan lagi. Dalam demonstrasi itu ada massa yang menyerbu ke ruang sidang dan ada pula yang menyerbu keruangan sekretariat. Mereka berteriak-teriak supaya Dewan segera dibubarkan. Dalam keadaan tekanan dari demonstran yang sedemikian itu, lalu ketua DPR Madura memutuskan pada prinsipnya setuju untuk memenuhi kehendak demonstran guna membubarkan dewan, sedang caranya akan dirundingkan kemudian. Oleh karena itu DPR Madura perlu didemisionerkan.

Setelah selesai demonstrasi ke DPR, maka para demonstran terus menuju ke rumah Wali Negara Madura. Sesampainya di sana, mereka diterima oleh RTA

Notohadikusumo, Bupati Pamekasan selaku Wakil Wali Negara Madura karena waktu itu Cakraningrat dalam keadaan sakit. Pimpinan demonstrasi memberitahukan bahwa DPR pada prinsipnya sudah membubarkan diri, oleh karena itu diharapkan Wali Negara menyerahkan mandatnya.

Keadaan demonstrasi juga tidak teratur, mereka berteriak-teriak supaya Negara Madura segera dibubarkan dan mereka menyerbu pendopo. Menghadapi sikap demonstran yang demikian maka Wakil Wali Negara menyerukan supaya tenang dan dia bersedia untuk menyampaikan tuntutan rakyat kepada Komisaris RIS yang ada di Pamekasan. Para demonstran merasa puas dan Wakil Wali Negara diajak para demonstran ke Kantor Komisaris RIS. Karena kantornya kosong dan tidak ada orangnya, maka papan namanya oleh demonstran dicabut. Demonstran sepakat untuk mengangkat RTA Notohadikusumo untuk diangkat sebagai Bupati RI. Penjaga keamanan di kantor tersebut rupanya tidak mengadakan reaksi dan tindakan apa-apa karena oleh para pemuda yang tergabung dalam gerakan bawah tanah telah dihubungi terlebih dahulu dan petugas-petugas itu telah berjanji untuk diam saja (Abdurachman,1988: 74).

5. Pembubaran Negara Madura untuk Kembali ke dalam NKRI

Pada tanggal 23 Februari 1950 Bupati R.T.A. Notohadikoesoemo melaporkan kepada Pemerintah RI di Yogyakarta mengenai situasi politik di Madura dan mendesak kepada pemerintah agar segera memberi keputusan bahwa Madura sudah masuk bergabung pada wilayah RI kembali. Setelah menunggu beberapa hari ternyata keinginan itu belum mendapat balasan dari pemerintah RI maka pada tanggal 4 Maret

1950, R.A. Abdul Gafoer, R. Abdul Salam, R. Moch. Munir, dan R. Ramadhan selaku wakil-wakil fraksi dalaam DPR Madura ditugaskan untuk menghadap Gubernur Jawa Timur untuk mendesak supaya dikeluarkan keputusan mengenai pengakuan daerah Madura masuk dalam wilayah RI. Ketika menerima delegasi dari Madura ini maka Gubernur Jawa Timur Samadikoen menyatakan sebagai berikut:

- a. Mengingat keputusan DPR Madura tanggal 10 Januari 1950 yang menyatakan bubarnya Negara Madura, sebagai langkah menuju terbentuknya Negara kesatuan.
- b. Pernyataan tanggal 2 Februari 1950, supaya Negara Madura digabungkan kepada RI, maka:
 1. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Soesanto Tirtoprodjo ketika mengunjungi Surabaya, Madura *de facto* diakui syah menjadi Daerah Karesidenan Madura sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur RI.
 2. Sebentar lagi akan ditunjuk seorang Residen Madura dari RI yang akan menjalankan Pemerintahan di daerah Madura (Abdruchman, 1988:74-75).

Di kalangan pemuda rasa ketidakpuasan terhadap pembentukan Negara Madura diantara diwujudkan dengan demonstrasi pada tanggal 15 Februari 1950 dengan mosi kepada dewan dan pemerintah, mereka menginginkan Madura kembali kepada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan ikut menyatakan dengan spontan bahwa Indonesia tetap menjadi Negara Kesatuan.

Reaksi berikutnya yang dilakukan rakyat adalah dengan cara memaksa para pejabat yang dirasa anti Negara Kesatuan RI baik yang menjabat kepala kecamatan maupun kepala kawedanan untuk menyerahkan dan mundur dari jabatannya. Beberapa pejabat yang menjadi incaran utama untuk diturunkan dari jabatannya diantaranya

adalah: Asisten Wedono Pegantenan R. Ario Moh. Hanafia, Asisten Wedono Pakong Moh Amin, Asisten Wedono Proppo Wongsodiredjo. Serta masih banyak lagi kalangan Pamong Praja yang hendak dipaksa meninggalkan jabatannya. Selain itu juga ada usaha untuk menurunkan pamong praja di Madura yang dianggap masih berbentuk feodal serta masih bersifat colonial. Diantara pejabat pamong praja yang pengangkatannya dulu banyak bernuansa kekeluargaan dan berbau feodal yang harus diturunkan dari jabatannya adalah:

1. Bupati Bangkalan Mr. Sis Cakraningrat, anak dari Cakraningrat bekas Wali Negara Madura.
2. Sekretaris Umum Wali Negara Madura Ruslan Cakraningrat anak dari Cakraningrat
3. Abdul Rachman, kepala Departemen Pemerintahan, Polisi dan Keamanan Umum Negara Madura, orang kepercayaan Cakraningrat.
4. Kiai Abdul Hamid Mudlahary, seorang kepercayaan Cakraningrat yang diberi tugas untuk dapat mempengaruhi psikologi rakyat Madura.
5. Hasyim Sosrodanuatmojo, Kepala Kepolisian Negara Madura.
6. R.P. Abdul Azis, ajudan dari Cakraningrat dan sekaligus keponakannya. Ia bekas Mayor Komandan Batayon VI-35. Semenjak Belanda menduduki Madura pada 4 Agustus 1947 ia sudah menyerahkan diri beserta anak buahnya dan kemudian oleh Belanda diangkat menjadi letnan yang selanjutnya menjadi ajudan.
7. R. Ar. Abdul Rahman, Wedono Bunder Pamekasan adalah keponakan dari Cakraningrat.

8. R. T.A. Zainalfatah, Bupati pamekasan yang masih bertalian famili dari Cakraningrat.
9. R.T. Pratamingkusumo, Bupati Sumenep adik dari Zainalfatah.
10. R.P. Moh. Rivai, Wedono Kwanjar Bangkalan, adalah adik dari Zainalfatah
11. R.P. Moh Sadali, Inspektur Kelas II di Bangkalan.
12. R. Ario Ousman, pegawai tinggi di Madura, keponakan Cakraningrat.
13. R.P. Machmud, Wedono ter beschiking Wali Negara.
14. R.P. Abdul Brotomiprojo, Patih Sampang yang masih bertalian keluarga dengan Cakraningrat.
15. R. Ar. Abdulrahman, Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten pamekasan, sepupu Zainalfatah dan masih bertalian keluarga dengan Cakraningrat.
16. R.Ar. Moh. Taha, Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten Bangkalan keponakan dari Cakraningrat.(Sumber: Arsip Kabinet Perdana Menteri Jogjakarta No.84 dikutip dari Seri Penerbitan Naskah Sumber Arsip No.2, Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2002: 174-176).

Untuk menghindari agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kemudian Gubernur Jawa Timur Samadikun menunjuk R. Sunarto Hadiwijoyo sebagai Wakil Residen Madura dengan surat keputusannya tertanggal 7 Maret 1950 No. 24/A/50.

Tidak lama kemudian pada tanggal 19 Maret 1950 turunlah Surat Keputusan Presiden RIS No. 110 tertanggal 19 Maret 1950 yang menetapkan daerah Madura sebagai Residen dari Republik Indonesia. Surat dari presiden ini kemudian ditindaklanjuti

dengan diadakannya serah terima kekuasaan di Madura dari pejabat sebelumnya yaitu R.T.A. Notohadikusumo kepada pejabat baru R. Sunarto Hadiwijoyo, sehingga dengan demikian sudah sepenuhnya Madura diperintah oleh pejabat RI. Beliau adalah pejabat Residen Madura yang pertama sesudah pendudukan Belanda berakhir (Abdurachman, 1988: 75-76).

BAB VI

KESIMPULAN

Peranan pemerintah Belanda dalam pembentukan Negara Madura sangatlah besar terutama melalui Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda van Mook. Pada berbagai kesempatan van Mook menekankan tentang wilayah pulau Madura yang mempunyai potensi yang sangat besar baik dari segi ekonomi maupun kebudayaan bilamana dijadikan negara tersendiri yang terpisah dari RI. Ia yakin bahwa Madura akan dapat menjelma menjadi suatu negara yang mempunyai daya hidup yang kuat dan akan mengembangkan identitasnya sendiri sehingga akan berhasil. Menurutnya sistem pemerintahan yang paling cocok untuk Indonesia adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan federasi. Dengan sistem ini maka akan dapat dihindarkan suatu pemerintahan yang sentralistik yang mungkin dapat mencekik suatu perkembangan yang demokratis.

Selain itu dalam diri pemimpin lokal Madura seperti Cakraningrat lebih tertarik pada ajakan van Mook untuk mendirikan Negara Madura yang berdiri sendiri dari pada bergabung dengan Negara RI sebenarnya dapat dilihat dari beban sejarah yang pernah dialami oleh para pemimpin lokal Madura pada masa dahulu. Meskipun secara geografis pulau Madura terpisah dari Pulau Jawa, namun secara politis wilayah ini selalu di bawah kekuasaan raja-raja besar di Jawa. Menurut para pemimpin di wilayah ini sejak zaman kerajaan Hindu maupun Islam telah terjadi Jawanisasi terhadap rakyat Madura. Ketakutan yang demikian ternyata juga masih muncul di dalam pikiran para pemimpin lokal Madura sesudah Indonesia Merdeka, sehingga tak mengherankan ketika pemerintah Belanda mengajak untuk mendirikan negara federal yaitu Negara

Madura yang terpisah dari kekuasaan Jawa (baca RI) mereka menyambutnya. Kerja sama antara para pemimpin lokal Madura dengan pemerintah Hindia Belanda sebenarnya bukanlah hal yang baru. Oleh Belanda rakyat Madura melalui para pemimpin lokalnya yang tergabung dalam Barisan Madura sering digunakan oleh Belanda dalam membantu menumpas pemberontakan yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia, seperti Perang Diponegoro, Perang Bone, Perang Aceh, dan sebagainya. Dari keberhasilannya mengalahkan para musuh Belanda ini, para pemimpin Madura banyak mendapat sanjungan dan penghargaan. Tidaklah mengherankan karena demikian cintanya pada Belanda beberapa bupati di Madura ketika meninggal dunia jenazahnya supaya ditutupi dengan bendera Belanda. Pengalaman sejarah yang demikian inilah yang menyebabkan mengapa mereka lebih senang kerja sama dengan pemerintah Belanda dari pada dengan pemimpin RI yang ada di Jawa.

Bersarkan surat dari Recomba Madura kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Komite Penentuan Kedudukan Madura di Pamekasan dijelaskan bahwa atas desakan berbagai golongan rakyat, maka pada tanggal 14 Januari 1948 di Pendopo Kabupaten Bangkalan berkumpul beberapa orang terkemuka Madura untuk mengadakan perundingan membahas masa depan Madura. Dari hasil perundingan itu terbentuklah sebuah Komite Sementara Penentuan Kedudukan Madura yang terdiri dari 11 orang yang diketuai Cakringrat. Pada tanggal 23 Januari 1948 komite ini menyelenggarakan pemungutan suara dengan hasil mayoritas rakyat menyetujui dibentuknya Negara Madura, meskipun dengan berbagai tekanan dari Belanda. Dari hasil inilah maka pada tanggal 20 Februari 1948 Belanda mengakui secara resmi berdirinya Negara Madura yang terpisah dari RI.

Pembentukan Negara Madura juga diilhami oleh Pembentukan Negara Jawa Timur yaitu *verslag* dari Rapat Komite Persiapan Kedudukan Jawa Timur yang diadakan di Gedung Nasional Indonesia (Bubutan) Surabaya pada tanggal 25 Januari 1948 yang menyatakan bahwa rakyat Jawa Timur mengetahui tentang adanya gerakan separatisme yang berupa Partai Rakyat Jawa Timur, selain partai tersebut berdiri pula PKM (Partai Kebangsaan Madura). Partai ini mendapat sambutan dari kalangan rakyat Madura dan mendirikan cabang di berbagai daerah.

Sebenarnya keinginan untuk membentuk Negara Madura adalah dari Belanda sendiri, agar Negara Indonesia Serikat menjadi kuat. Oleh karena itu pada saat pemungutan suara Belanda melakukan tekanan-tekanan dan menangkapi orang-orang yang dicurigai pro Republik. Pada saat diadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Negara Madura dibentuklah secara ilegal suatu kegiatan agar supaya orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang pro Republik. Usaha tersebut dapat berhasil dengan baik, namun pada waktu kemudian Belanda dapat mencium adanya gerakan ini, maka pada tanggal 24 Agustus 1948 diadakan penangkapan secara besar-besaran kepada danya gerakan ini, maka pada tanggal 24 Agustus 1948 diadakan penangkapan secara besar-besaran kepada mereka-mereka yang masih simpati terhadap Negara RI. Mereka kemudian ditahan di rumah-rumah penjara yang ada di Surabaya.

Akhirnya rakyat Madura ingin kembali ke NKRI, dengan diadakan Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan rencana untuk persetujuan yang isinya antara lain: rencana program penyerahan kedaulatan, rencana status uni dan rencana persetujuan peralihan serta Undang-Undang RIS yang masih perlu disyahkan oleh Parlemen Belanda, Republik Indonesia dan negara-negara bagian yang tergabung dalam BFO

(*Bijeenkomst voor Federale Overleg/ Majelis Permusyawaratan Federal*), oleh karena itu dalam negara-negara bagian timbul suasana politik yang baru, yakni semangat negara-negara bagian untuk menggabungkan diri kepada wilayah RI. Selanjutnya pembubaran Negara Madura dan Dewan Perwakilan Rakyat Negara Madura dilakukan pada tanggal 15 Februari 1950 di Pamekasan. Pernyataan-pernyataan ketidakpuasan tersebut sudah dilaksanakan dengan beberapa macam resolusi dari berbagai partai dan badan-badan perjuangan di Madura sejak bulan November 1949 yang langsung disampaikan kepada Dewan Rakyat Madura sebagai satu-satunya wakil rakyat. Keinginan dan hasrat tersebut dibuktikan dengan adanya demonstrasi tanggal 15 Februari 1950 dengan *motie van wantrouwenja* kepada dewan dan pemerintah yang ingin melihat Madura kembali kepada Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, 1971. *Sejarah Madura Selayang Pandang*. Sumenep: tp
- Agung, Ide Anak Agung Gde, 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djafaar, Irza Arnyta, 2005. *Dari Moloku Kie Raha hingga Negara Federal: Biografi Politik Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djahir Sjah*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Dekker, Nyoman, 1980. *Sejarah Revolusi Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gonggong, Anhar, "Otonomi-Federasi Pascakemerdekaan: Kasus Indonesia", disampaikan pada Seminar Nasional Negara dalam Sejarah Indonesia. Jakarta 31 Agustus 1999.
- Hugiono, 1987. *Pengantar ilmu Sejarah*. Bandung: Bina Aksara.
- Jonge, Huub de, 1989. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Kahin, R Audrey. 1990. *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Grafiti.
- Kasdi, Aminuddin. 2003. *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726-1745)*. Yogyakarta: Jendela.
- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- , 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa
- Mangunwijaya, YB, 1998. *Memuju Republik Indonesia Serikat*. Jakarta: Gramedia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, 1992. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rauf, Maswadi, "Negara Kesatuan" disampaikan dalam Seminar Nasional Negara dalam Sejarah Indonesia, Jakarta 31 Agustus 1999.
- Ricklefs, MC, 1994. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Seri Penerbitan Naskah Sumber Arsip No.2, 2002. *Pembentukan Negara Madura Tahun 1948 dan Dampaknya terhadap Republik*. Surabaya: Badan Arsip Propinsi Jawa Timur.

**Suwarno, P.J, 1990. *Sejarah Birokrasi, Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*.
Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.**

**Wiryoprawiro, Zein, 1986. *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan Pendekatan
Historis dan Deskriptif*. Surabaya: ITS Surabaya.**

LAMPIRAN I

Resolusi Komite Penentuan Kedudukan Madura dari Ketua Panitia (Soekaris) Tentang Komite Penentuan Kedudukan Madura tahun 1948

Dalam pembicaraan pada sidang tanggal 16 Januari 1948 berpendapat bahwa sejak tanggal 11 nopember 1947 hubungan antara Madura dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia telah terputus oleh karena sejak tanggal 21 November 1947 untuk kepentingan rakyat, negara dan pemerintah diambil alih oleh R.A.A. Tjakraningrat.

Corak dari pem,erintahan adalah pemerintahan sendiri dengan bekerja sama dengan pemerintah umum. Pemerintah masih bersifat sementara sehingga ada ketentuan pasti tentang kedudukannya.

Menimbang dari resolusi diatas maka:

- a. Rakyat Madura berhak dan berdiri dalam menentukan nasibnya sendiri.
- b. Sehubungan dengan keadaan politik Indonesia pada saat itu, mereka sudah saatnya untuk menetapkan status kedudukan Madura.

Dalam resolusi tersebut diatas diputuska bahwa permintaan persetujuan pada Rakyat Madura tentang pokok-pokok kesimpulan pendapat dari Komite Penentuan kedudukan Madura sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa hubungan antara Madura dan Republik Indonesia terputus
- b. Menetapkan kedudukan (status) Madura bercorak Negara Merdeka, bagian dari Indonesia Serikat
- c. Menunjuk P.T.R.A.M. Sis Tjakraningrat Bupati Bangkalan sebagai utusan Madura duduk dalam K.I.S.

- d. Memohon kepada P.T.R.A.A. Tjakraningrat bersedia memegang pimpinan Pemerintahan Negara Merdeka sebagai Wali Negara.
- e. Mengusahakan kepada Wali Negara Madura dan Komite Penentuan Kedudukan Madura.
 - 1. Untuk Menyusun dan menetapkan corak dan bentuk pemerintahan yang berdasarkan demokrasi menurut azas umum dalam Perjanjian Linggarjati.
 - 2. Menambah utusan Madura dalam K.I.S., sebanyak-banyaknya 3 orang.
 - 3. Menambah jumlah anggota Komite Penentuan kedudukan Madura.
- f. Memohon kepada Pemerintah Belanda untuk mengakui (*erkennen*) kedudukan (status) Madura.

(Sumber: Arsip Kementerian Penerangan No. 99, dikutip dari Seri Penerbitan Naskah Sumber Arsip no. 2 Badan Arsip propinsi Jawa Timur Tahun 2002, hlm. 25-26)

LAMPIRAN 2

Surat dari Djawatan Penerangan (R.V.D.) Kepada Letnan Gubernur Jenderal van Nederlansch Indie tentang Rencana Menyelenggarakan Aksi Massa tahun 1948

Pada rapat tanggal 26 Februari 1948, dibentuk Panitia perjuangan Madura terdiri dari:

1. Ketua : R. Sosradanoekoesoemo;
2. Wakil Ketua : M. Tabrani;
3. Bendahara : R. Senosastro;
4. Panitera I : M. Kafrawi dan R. Abulhajat untuk Jogjakarta; R. Rooslan Wongsokoesoemo untuk Blitar; K. Amin Djakfar untuk Kediri; R. Iljas untuk Toeren; R.P. Moh. Noor dan R. Soelaiman untuk Babad.

Maksud dari rapat tersebut menggerakkan golongan Madura untuk memperjuangkan Pulau Madura dan rakyatnya dalam lingkungan Republik Indonesia.

(Sumber: Arsip Kementerian Penerangan No. 99, dikutip dari Seri Penerbitan Naskah Sumber Arsip no. 2 Badan Arsip propinsi Jawa Timur Tahun 2002, hlm. 43)

Annisa
3025

U
A
L